

Analisis Kebijakan BUMDes Tentang Pengelolaan Wisata Setigi Untuk Perkembangan Ekonomi Masyarakat Sekapuk

Nadia Mar'atus Sholihah

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: nadiamaratussholihah@gmail.com*

Bambang Kusbandrijo

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: bambang_kusbandrijo@untag-sby.ac.id*

Abstrak

Desa Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai ketrampilan dan kemampuan masing-masing, Seperti halnya dikutip di Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 – 2025 pemerintah kabupaten gresik ingin mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan Perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi dibidang Pariwisata, kerjasama antar usaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja dan melaksanakan upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Peran BUMDes Sekapuk sebagai pengelola utama wisata setigi sangatlah berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan BUMDes Sekapuk selaku pihak pengelola wisata dan juga masyarakat desa yang berperan sebagai karyawan/pekerja di wisata setigi.

Kata kunci: *Pariwisata, Desa Wisata, Badan Usaha Milik Desa, Desa Sekapuk*

Pendahuluan

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang mulai diperhitungkan atau diperhatikan di berbagai negara baik negara maju ataupun negara sedang berkembang tidak terkecuali Indonesia. Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan didukung oleh sumber daya alam dan budaya yang beragam sangat potensial untuk diolah dan dimanfaatkan. Dari sumber daya alam yang ada, pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi yang sangat layak untuk dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Seperti halnya dikutip di Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 – 2025 “mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan Perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi dibidang Pariwisata,

kerjasama antar usaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat". Di Kabupaten Gresik sendiri merupakan wilayah yang terletak di bagian utara Pulau Jawa. Selain fakta tersebut, ternyata Kabupaten Gresik juga menyimpan potensi alam yang sangat menawan, baik dataran tingginya maupun keindahan pantainya. Apa saja tempat wisata yang cukup terkenal di Gresik diantaranya ada: wisata religi sunan giri, wisata pantai delegan, wisata pulau bawean, wisata bukit kapur setigi (Jannah, 2019). Kabupaten Gresik di bagian utara banyak terdapat pegunungan kapur yang cukup panjang. Selain dimanfaatkan sebagai tambang batu kapur, ada pula yang dijadikan obyek wisata yang dikenal dengan nama 'Wisata Setigi'. Wisata Bukit Kapur (SETIGI) dibangun pemerintah Desa Sekapuk dalam upaya pelestarian lokasi bekas galian tambang batu kapur tersebut. Jika tidak ada upaya pencegahan atau pelestarian seperti ini, maka Desa Sekapuk akan kehilangan kekayaan alam tersebut. Wisata ini terletak di Desa Sekapuk, yang terletak di Kecamatan Ujungpangkah. Desa sekapuk memiliki luas wilayah kurang lebih 2.97Km², penduduk di Desa Sekapuk berjumlah ±4913. Sebelum dibukanya wisata setigi yang di kelola oleh BUMdes, mayoritas mata pencaharian penduduk Sekapuk adalah penambang bukit kapur untuk dijadikan bata putih yang presentasi kecelakaannya sangat besar dan penghasilannya sangatlah kecil. Dari namanya, wisata ini menawarkan Selo (bebatuan), Tirto (Air) dan Giri (gunung). Di wisata tersebut banyak wahananya. Mulai dari Pahatan Gerbang Ghoib, Patung Semar, Jembatan Peradaban, Candi Topeng Nusantara, Miniatur Masjid Persia, Air Terjun, Telaga Warna, Nogo Giri Pancoran, dan masih banyak lainnya. Tempat wisata ini, dulunya merupakan tempat warga membuang sampah, dari 2003 hingga 2017. Tapi mulai 2018 warga Desa Sekapuk membersihkan sampah, karena warga sadar tempat ini cocok digunakan untuk tempat wisata. Dalam lahan seluas 1,5 hektar yang disiapkan, obyek wisata yang dijalankan oleh BUMDes Sekapuk ini bakal menyuguhkan beberapa tawaran kepada para pengunjung. Disamping sebagai pengelola BUMDes masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan obyek wisata diantaranya pemandu wisata, penyedia jasa penyebrangan menggunakan perahu, dan juga mendirikan warung-warung yang menyediakan berbagai makanan khas Gresik. Wisata Bukit Kapur (SETIGI) mulai dikunjungi masyarakat sejak 2018 Kemudian Pemerintah Desa meresmikan dan melakukan grand opening pada wisata tersebut pada tanggal 01 Januari 2020 oleh Kepala Desa Sekapuk. Wisata alam bukit kapur setigi ini terdiri dari hamparan bukit kapur yang membentuk mulai dari danau buatan beserta jembatan, rumah honai Papua, wahana wisata air, spot foto, dinding topeng, hingga gunung kapur bekas tambang yang terlihat indah

Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Wisata Bukit Kapur Setigi di Desa Sekapuk Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dan BUMDes Sekapuk yang bertanggung jawab untuk mengelola Wisata Bukit Kapur di Desa Sekapuk.

2. Data Penelitian

Data yang Mendukung dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah segala informasi kunci yang didapat dari BUMDes Sekapuk Serta Masyarakat Desa Sekapuk yang mengetahui tentang perkembangan ekonomi masyarakat di sekitar Wisata Bukit Kapur (SETIGI).

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah Pengolahan data yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu mengolah data dengan lebih banyak mengumpulkan data dan menguraikannya secara menyeluruh dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga akan diperoleh suatu hasil dari pengolahan data yang disebut hasil penelitian (Mandira & Atmadja, 2014).

3. Teknik Analisis Data

Teknik penelitian yang digunakan untuk menggali data adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data dibagi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada penulis, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada penulis. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dari orang-orang yang diwawancarai sedangkan data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto.

4. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dalam hal ini penulis mengambil data langsung dari Wisata Bukit Kapur Setigi di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penulis dilapangan, maka jumlah data yang akan didapat juga semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data memiliki makna merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

5. Penyajian Data

Penyajian data ini peneliti melakukan penyajian dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data bertujuan agar penulis dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

6. Verifikasi

Dalam hal ini penulis mencari hubungan-hubungan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Badan usaha milik desa yang sering disebut BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa. BUMDes Desa Sekapuk dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa Sekapuk dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa Sekapuk. Begitupun peran BUMDes dalam pengelolaan dan pembangunan Wisata Bukit Kapur (SETIGI). Selain sebagai sumber dana untuk wisata, BUMDes Desa Sekapuk juga berperan sebagai pengelola utama Wisata Bukit Kapur (SETIGI). Adapun Visi dan Misi BUMDes Sekapuk untuk meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat desa, yaitu:

a) Visi

Menjadikan BUMDES Sekapuk sebagai lambang usaha desa yang berkualitas yang mampu melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

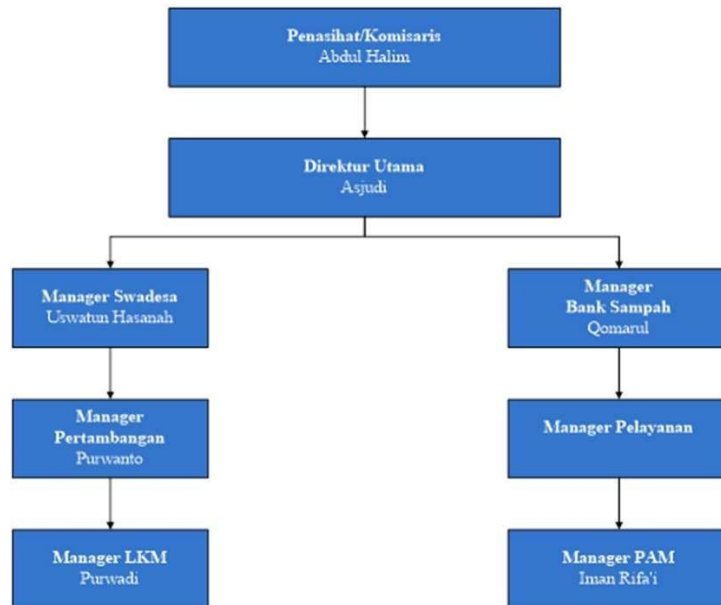
b) Misi

- a. Mengelola potensi desa agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat
- b. Memfasilitasi kelompok tani untuk meningkatkan produksi
- c. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan BUMDES
- d. Mengembangkan potensi ekonomi desa sebagai sumber kekuatan dalam mengembangkan usaha
- e. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang produktivitas masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dida Rahmadanik, bahwasannya keberadaan BUMDes bukan hanya seputar simpan pinjam Desa melainkan juga dapat mempromosikan produk yang dihasilkan oleh masyarakat disekitar wisata, yang mana hal ini dapat meningkatkan pendapatan para pelaku usaha.

BUMDes Sekapuk memiliki struktur organisasi untuk memaksimalkan kinerja BUMDes. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar.1 Struktur Organisasi BUMDes Sekapuk



Sumber: Penulis 2020

BUMDes Sekapuk dalam pengelolaan Wisata Bukit Kapur Setigi membentuk sebuah organisasi yang bernama Pokdarwis Pelangi merupakan singkatan dari *Kelompok Sadar Wisata*. Pokdarwis Pelangi dibentuk oleh Kepala Desa Sekapuk pada tahun 2018 di Desa Sekapuk Kabupaten Gresik. Organisasi ini menghimpun pemuda-pemudi warga Desa Sekapuk yang berminat secara suka rela dalam pengembangan dan pelestarian wisata yang dimiliki oleh Desa Sekapuk yaitu wisata bukit kapur setigi. Adapun Visi, Misi, Tujuan, dan Sifat Pokdarwis Desa Sekapuk, yaitu:

a) Visi

Terwujudnya Kelompok yang peduli akan kekayaan wisata, pengembangan wisata, serta menubuhkan hubungan baik dengan pemerintah, dan masyarakat.

b) Misi

1. Memahami dan melaksanakan AD/ART sebagai landasan konstitusi
2. Melaksanakan segala bentuk kegiatan wisata dengan penuh komitmen, sukarela, dan tanggung jawab.
3. Mengenalkan, mempromosikan, dan peduli terhadap kekayaan alam yang dimiliki Desa Sekapuk dan berperan aktif untuk menjaga kelestariannya.
4. Berperan aktif dalam pengembangan, pelestarian dan kegiatan promosi Objek Daya Tarik Wisata SETIGI.

5. Menjalin kerjasama dengan Pemerintahan Daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk mengembangkan, mempromosikan dan memasarkan Wisata SETIGI

c) Tujuan

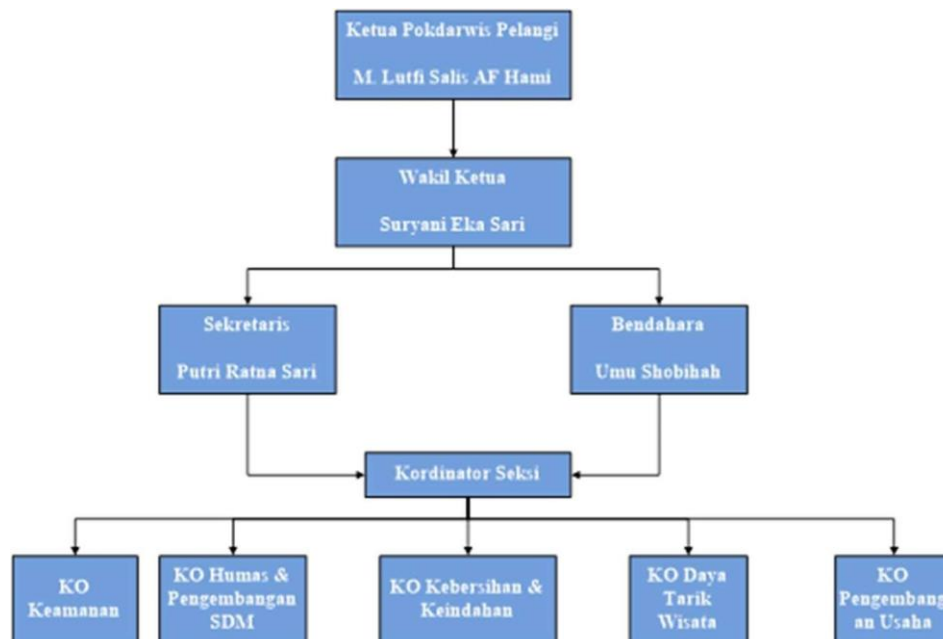
Tujuan dari dibentuknya Pokdarwis ini untuk Menghimpun potensi yang ada bersama-sama mengupayakan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta menunjang pemerintah dalam menangani permasalahan kepariwisataan.

d) Sifat

Pokdarwis Pelangi Desa Sekapuk bersifat sosial, sukarela, dan kekeluargaan.

Pokdarwis Pelangi Desa Sekapuk memiliki struktur organisasi, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada Gambar 2.

Gambar.1 Struktur Organisasi POKDARWIS Pelangi



Sumber: Penulis 2020

Pembahasan

1. Analisis Kebijakan Bumdes Tentang Pengelolaan Wisata Setigi Untuk Perkembangan Ekonomi Masyarakat

Analisis data dan temuan di lapangan yang penulis lakukan dengan menggunakan model analisis kebijakan publik menurut Dunn (2003) dimana untuk menganalisis kebijakan meliputi lima (5) tahapan, yaitu pencarian masalah, peramalan masa depan, rekomendasi kebijakan, pemantauan hasil kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Namun dalam hal

ini penulis akan memfokuskan tiga (3) tahapan, berikut penjabarannya:

Pencarian Masalah

Melihat faktor yang mempengaruhi analisa kebijakan BUMDes yang tertulis di Peraturan Desa Sekapuk Nomor 06 Tahun 2018 Tentang “Rencana Pembangunan Kepariwisata Desa Sekapuk” disebutkan bahwa dalam pasal 11 A yang berisi tentang pengembangan kelembagaan pengelolaan kepariwisataan yang kuat dan berkesinambungan melalui BUMDesa dan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, penulis menemukan beberapa faktor, yaitu:

a) Faktor Pendukung

Wisata bukit kapur (SETIGI) dibangun dengan tujuan untuk melestarikan keberadaan perbukitan kapur yang sudah semakin habis kondisinya oleh aktifitas pertambangan yang dilakukan sejak 1962 sampai sekarang. Dengan faktor tersebut pemerintah Desa Sekapuk memutuskan untuk mengambil alih sebagian lahan yang dulunya dikelola oleh PT. POLOWIJO GOSARI untuk dikelola oleh pemerintah daerah Sekapuk untuk dijadikan sebagai obyek wisata alam penghijauan yang bertema keluarga. Dengan dibangunnya wisata Bukit Kapur (SETIGI) ini. Pemerintah Desa Sekapuk berharap dapat melestarikan warisan alam tersebut. Kemudian dilakukan grand opening untuk peresmian obyek wisata tersebut pada tanggal 11 Mei 2018 oleh Kepala Desa Sekapuk Bapak Abdul Halim “Arti nama SETIGI sendiri merupakan kepanjangan dari selo (batu) tirta (air) giri (bukit) (SETIGI merupakan singkatan dari Selo, Torto, Giri. Itu secara spontan memang saya yang mengambil nama tersebut untuk dijadikan sebuah nama untuk wisata ini, melihat kondisi tanah awalnya itu kan memang bukit itu kan ada bumi terang waduk tempatnya air yang sekarang malah berbalik dimana waduk menjadi titik terendah daerah karena sering digali jadi datarannya rendah”. Yang dimaksud dalam galihan pertambangan ini adalah dan karena aktifitas warga dulu sampai sekarang warga Desa Sekapuk dan sekitarnya mayoritas bekerja sebagai buruh tambang batu kapur di bukit kapur sekapuk. Karena di terus digali dan diambil hasil buminya akhirnya saat ini meninggalkan bekas-bekas galian yang membentuk seperti goa, tebing-tebing yang menjulang dan sangat indah seperti bangunan di peradaban kuno. Yang paling disukai wisatawan disini adalah tebing-tebing bekas galian tersebut banyak membentuk lorong, goa dan menyisakan tiang-tiang kokoh dari batu kapur yang menjadi simbol SETIGI dan menjadi tempat favorit bagi wisatawan untuk dijadikan spot-spot foto selfi maupun sebagai background foto [rewed. Entah kenapa jika dilihat sekilas

melihat bekas galihan bukit kapur justru seperti sebuah istana purba yang sangat historis. *“Wisata bukit kapur SETIGI yang baru berdiri ini dikelola bersama oleh BUMDES bersama masyarakat Desa Sekapuk. Dan untuk membantu kinerja BUMDES kepala desa Sekapuk membentuk suatu organisasi untuk mengatur dan merawat wisata yang disebut POKDARWIS Pelangi (Kelompok Sadar Wisata). “POKRADIWS Pelangi merupakan bagian dari masyarakat swadaya untuk membantu tercapainya wisata yang kondusif”.*

Memasuki area Wisata Bukit Kapur SETIGI bisa melalui dua jalur, yaitu melewati Gerbang pintu masuk Desa Sekapuk melalui jalur selatan dan menuju kesisi Utara dan melwati Desa Gosari melalui jalur utara dari Wisata Pasir Putih Delegan untuk menuju ke tujuan Wisata Bukit Kapur SETIGI yang letaknya disisi kanan jalan desa Sekapuk. Memasuki Kawasan Wisata Bukit Kapur para wisatawan akan disambut hamparan bukit kapur yang luas dan indah. Pada musim kemarau saat ini cuaca di SETIGI jika siang hari agak panas, akan tetap tidak membuat para wisatawan untuk mundur saat akan mengunjungi SETIGI. Biasanya wisatawan sekitar SETIGI akan berkunjung di sore hari untuk melihat sunset di SETIGI. Wisata Bukit Kapur SETIGI terkenal sebagai tempat untuk berfoto karena background yang sangat unik dan indah.

Strategi atau upaya yang digunakan oleh pihak SETIGI guna menarik pengunjung, yang pertama adalah dengan cara mempromosikan melalui media cetak maupun elektronik, namun tanpa adanya promosi pun wisatawan tertarik dengan sendirinya untuk mengunjungi SETIGI, hal ini dikarenakan keingintahuan masyarakat itu sendiri, mengingat bahwa SETIGI merupakan tempat wisata alam yang sangat jarang ditemui dan penuh sejarah yang patut dikunjungi. *“Disamping itu media-media elektronik mulai datang untuk berkunjung dan melihat keindahan SETIGI, baik dari tv lokal, nasional, maupun swasta seperti KOMPAS TV, TVRI, JTV, RCTI, ANTV, TRANS TV, TV ONE, dan SBO TV dan lain sebagainya. Biasanya televisi-televisi seperti ini memanfaatkan keindahan - keindahan SETIGI untuk dijadikan sebagai background-background pengambilan gambar. Nah, dari sini kami memberitahukan bahwa di SETIGI ini ada banyak sekali spot-spot foto yang patut untuk dikunjungi”.*

Adapun spot-spot foto yang menarik wisatawan untuk datang ke Setigi, yaitu:

1) Goa Emas

Dinamakan Goa Emas, karena dinding-dinding goa tersebut berwarna menyerupa warna kuning emas yang dihasilkan secara alami, bisa juga kelembapan yang terjadi di goa tersebut.

2) Watu Jodoh

Disebut sebagai Watu (batu jodoh dikarenakan diwisata ini terdapat salah satu batu yang berbentuk seperti sepasang tangan yang saling menggenggam satu sama lain layaknya sepasang kekasih yang berjodoh.

3) Night Stone

Wisata alam ini berlangsung sampai malam hari sampai pukul 21.00 WIB dengan menyuguhkan nuansa malam hari dengan dinding-dinding goa, tebing, dan bukit yang dipenuhi dengan lampu layaknya pemandangan Night Stone.

b) Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dari pembangunan Wisata Bukit Kapur Setigi, yaitu dari sektor pembiayaan. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Purwadi Selaku manajer LKM di BUMDes Sekapuk. *“Pada tanggal 11 Mei 2018, wisata Bukit Kapur SETIGI resmi dibukak untuk umum. Mengenai tarif masuk SETIGI saat itu masih gratis karena dari pihak BUMDES sendiri belum mengeluarkan SK tarif untuk SETIGI. Dikarenakan wisata baru pembangunan-pembangunan yang ada di dalam SETIGI masih dalam tahap pengerjaan, dan saat ini sumber dana untuk SETIGI bersumber dari BUMDES dan invest dari warga Sekapuk saja. Pihak pengelola memang tidak meminta bantuan pada investor luar untuk pembangunan SETIGI. Akan tetapi pihak pengelolah hanya bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Gresik untuk pengawasan dalam pengembangan dan proses pembangunan Wisata Bukit Kapur SETIGI. Dikarenakan sumber dana untuk pembangunan SETIGI dari BUMDES dan warga maka pembangunan SETIGI dibidang akan berlangsung lambat namun akan tetap berangsur-angsur untuk tetap mengembangkan SETIGI kedepannya”*.

Adapun faktor penghambat lain, seperti yang terjadi pada saat Pandemi Covid-19 yang membuat Wisata Setigi terpaksa ditutup selama dua bulan. Seperti yang dikatakan Purwadi selaku manajer LKM BUMDes Sekapuk. *“Pandemi COVID-19 merupakan tamparan keras bagi usaha di sektor kepariwisataan, hal itu karena sektor pariwisata terpaksa ditutup selama kurun waktu yang cukup panjang, dampak tersebut membuat pihak pengelola harus mencari penutup dana perawatan objek wisata selama masa pandemi”*.

2. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan adalah langkah ketiga dalam model analisis kebijakan menurut Dunn (2003:405). Setelah kita mengetahui bagaimana masalah yang terjadi, kemudian selanjutnya melakukan peralaman untuk masa depan, langkah selanjutnya yaitu memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan masalah

yang ada. Sehingga rekomendasi kebijakan mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan. Dalam penelitian mengenai Analisis Kebijakan BUMDes Tentang Pengelolaan Wisata Setigi Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Sekapuk, penulis mendapatkan hasil rekomendasi kebijakan yang tepat dan telah disepakati BUMDes dan Pemerintah Desa Sekapuk. Ada beberapa rekomendasi yang diungkapkan oleh salah satu karyawan di Wisata Bukit Kapur Setigi bahwa: 0“Untuk saat ini kebijakan di Wisata Bukit kapur Setigi masih terpacu ke Peraturan Desa Sekapuk Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Kepariwisataan Desa Sekapuk, untuk rekomendasi kebijakan sebaiknya dibuatkan kebijakan khusus yang membahas Wisata Setigi”.

Bedasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis ketahui rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan wisata setigi direkomendasikan untuk dikeluarkan kebijakan yang langsung mengarah ke Wisata Bukit Kapur Setigi seperti: SOP Pengelolaan Wisata, SOP Pengunjung, dan Peraturan Desa Tentang Wisata Bukit Kapur Setigi.

3. Pemantauan Hasil Kebijakan

Pemantauan kebijakan adalah langkah keempat dalam analisis kebijakan menurut Dunn. Dalam pemantauan kebijakan sering disebut sebagai monitoring, yaitu penilain dan pengawasan sat kebijakan ini sedang dilakukan. Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kebijakan pengelolaan wisata setigi Desa Sekapuk ini dapat dilakukan oleh berbagai macam pihak termasuk akan ada campur tangan dari masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Purwadi kepada peneliti bahwa: “Sejak Peraturan Desa Sekapuk Nomor 06 Tahun 2018 Tentang “Rencana Pembangunan Kepariwisataan Desa Sekapuk” disahkan kita terus melakukan pemantauan agar hasilnya lebh optimal, dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pemantauan dapat dilakukan melalui lembaga atau badan yang ditunjuk, untuk pemantauan di Wisata Bukit Kapur Setigi saat ini sudah dibentuk POKDARWIS PELANGI SEKAPUK, dan masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi”.

Bedasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis ketahui bahwa monitoring atau pemantauan kebijakan dilakukan dengan kesesuaian rencana dan pelaksanaan program yang sedang dijalankan. Dalam pemantauan kebijakan BUMDes Sekapuk menjalankan fungsi pengawasan atas program yang tengah dilakukan, Selain pemantauan melalui pemerintah desa dan badan yang sudah dibentuk, pemantauan juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat yang merasakan dampak pembangunan Wisata Bukit

Kapur Setigi. Masyarakat dapat ikut serta dan ikut mengawasi jalannya program atau kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa.

Dalam melihat perkembangan yang dilakukan guna melihat sejauh mana dan seperti apa perkembangan kawasan Wisata Bukit Setigi. Hal tersebut diungkapkan oleh Purwadi Selaku Manajer LKM di BUMDes Sekapuk. *“Saat ini Wisata Bukit Kapur SETIGI belum ada program apa-apa untuk meningkatkan mutu wisata. Semua kegiatan masih bebas dilakukan oleh wisatawan selama tidak menyalai aturan dan norma agama. Wisata SETIGI sering dijadikan tempat untuk para fotografer menyalurkan bakat dibidangnya, mulai dari foto praweding, foto selfi, foto keluarga, foto shoot, dll. Biasanya jika ada wisatawan yang akan berkunjung ke SETIGI satu minggu sebelum kedatangan yang sifatnya rombongan atau organisasi nantinya dari pihak pengelola akan ada pendampingan selama perjalanan di SETIGI.”* “Dalam program kedepannya Wisata Bukit Kapur SETIGI akan menyediakan wahana edukasi untuk anak-anak dari tingkat TK sampai SMA dalam pembelajaran mengenai asal muasal bebatuan terbentuk. Dan untuk mengembangkan program tersebut membutuhkan tenaga kerja yang profesional dan handal dalam bidangnya. Untuk mewujudkan program tersebut pihak pengelolah masih mencari bibit-bibit pemuda dari warga desa Sekapuk sendiri agar bisa menciptakan pemuda-pemuda yang giat dan pintar dalam dunia wisata”.

Penulis menemukan informasi mengenai soal pemantauan hasil kebijakan yang nanti akan dilaksanakan. Hal ini diungkapkan Purwadi Manajer LKM BUMDes Sekapuk bahwa: *“Pemantauan terkait hasil kebijakan dan Peraturan Desa Sekapuk Nomor 06 Tahun 2018 Tentang “Rencana Pembangunan Kepariwisataan Desa Sekapuk” di pantau setiap tahun pada saat MUSREMBANG DESA untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Termasuk kebijakan tentang pengelolaan stand kantin di dalam wisata setigi yang dikelola setiap RT dan juga terkait pembagian hasil dari Wisata Bukit Kapur Setigi untuk pembangunan desa, karena rencana awal pembangunan wisata ini bertujuan untuk Ekonomi Kerakyatan”*

Bedasarkan hasil wawancara dapat penulis ketahui bahwa pemantauan hasil kebijakan dalam analisis kebijakan publik bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai, tujuan, dan target dalam kebijakan tersebut. Dalam hal kebijakan pengelolaan Wisata Bukit Kapur Setigi ini dalam setiap programnya dibuat sebuah rencana yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, BUMDes, dan juga lembaga terkait. Pada rencana tersebut memuat hal-hal mengenai program

pembangunan desa yang harus dijalankan disetiap tahunnya. Dengan begitu evaluasinya dilaksanakan di setiap tahun pada saat MUSREMBANG DESA yang melibatkan seluruh pemegang kepentingan (*stakeholder*).

Bedasarkan pemaparan diatas mengenai gambaran kebijakan BUMDes Tentang Pengelolaan Wisata Setigi Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Sekapuk dapat diketahui bahwa pengelolaan Desa Wisata tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perkembangan wisata. Faktor tersebut akan menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, lingkungan.

Wisata bukit kapur (SETIGI) dibangun dengan tujuan untuk melestarikan keberadaan perbukitan kapur yang sudah semakin habis kondisinya oleh aktifitas pertambangan yang dilakukan sejak 1962 sampai sekarang. Dengan faktor tersebut pemerintah Desa Sekapuk memutuskan untuk mengambil alih sebagian lahan yang dulunya dikelola oleh PT. POLOWIJO GOSARI untuk dikelola oleh pemerintah daerah Sekapuk untuk dijadikan sebagai obyek wisata alam penghijauan yang bertema keluarga. Dengan dibangunnya wisata Bukit Kapur (SETIGI) ini.

Dalam pengelolaan wisata ini ada perbedaan kewenangan antara pemerintah Desa dengan BUMDes. Berikut dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan Kewenangan Pemerintah Desa & BUMDes Sekapuk

No.	Kewenangan Pemerintah Desa	Kewenangan BUMDes
1	perencanaan dan pengendalian pembangunan	perencanaan dan pengendalian pembangunan
2	perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang	perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3	penyedia sarana dan prasarana umum	pengelola sarana dan prasarana umum
4	penyedia fasilitas pengembangan wisata	pengembangan dan pengelolaan wisata
5	penyedia fasilitas ekonomi kerakyatan	pengembangan ekonomi kerakyat
6	pengendalian lingkungan hidup	pengendalian lingkungan hidup

Sumber: Penulis 2020

Bedasarkan tabel 1 diatas, adanya perbedaan kewenangan antara Pemerintahan Desa Sekapuk dengan BUMDes Sekapuk, untuk itu setiap jajaran stakeholder hendaknya selalu memperkuat setiap kelembagaan agar terjadi kesenjangan. Sejak awal perencanaan pembangunan Wisata Bukit Kapur Setigi pemerintahan Desa Sekapuk membuat program Desa mandiri yang bertujuan untuk memperkuat Ekonomi Kerakyatan. Alasan pemerintah desa merencanakan pembangunan Wisata Bukit Kapur Setigi karena beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Sekapuk. Beberapa isu atau permasalahan yang penulis temui dilapangan yakni seperti pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Permasalahan Di Desa Sekapuk

lo.	Permasalahan	Perkembangan	Solusi
1	Kesejahteraan belum tercapai	Semakin bertambahnya penduduk menjadikan angka pengangguran semakin besar	Meningkatkan kualitas SDM sehingga masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri
2	Sarana Prasarana yang kurang memadai	Pembangunan sarana prasarana yang belum 100%	Mengembangkan dana desa di sektor usaha lain untuk memaksimalkan fasilitas wisata
3	Pendanaan wisata yang kurang dari target	Rencana pembangunan wisata tidak sejalan dengan Pendapatan Asli Desa	Membuka Tabungan investasi untuk masyarakat sehingga masyarakat ikut serta dalam pemnbangunan wisata.
4	Belum adanya SOP khusus yang mengatur pengelolaan wisata Setigi	Kebijakan wisata yang masih mengacu pada Peraturan Desa Sekapuk Nomor 06 Tahun 2018 Tentang “Rencana Pmebangunan Keparuwusataan Desa Sekapuk”	Penerbitan SOP atau Kebijakan yang Khusus mengatur Pengellaan Wisata Setigi.

Sumber: Penulis 2020

Bedasarkan tabel 3 diatas, beberapa isu permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini merupakan hasil dari temuan dilapangan saat penulis melakukan observasi. Permasalahan yang terjadi saat ini dikarenakan program yang dibuat oleh pemerintah desa sebelumnya masih belum optimal, sehingga menimbulkan berbagai masalah di Desa Sekapuk. Untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis Kebijakan BUMDes Tentang Pengelolaan Wisata Setigi Untuk Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Sekapuk dengan menggunakan model analisis kebijakan publik menurut Dunn (Dunn, 2003).

Dalam konsep kebijakan ada tahapan dimana tahapan disebut analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual dan praktis yang di tujukan untuk menciptakan, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan dapat dilakukan sebelum atau sesudah kebijakan itu dibuat. Dalam analisis kebijakan menurut Dunn ada lima (5) langkah yang harus dilakukan yaitu: Pencarian masalah, Peramalan Masa depan (Forecasting), Rekomendasi Kebijakan, Pemantauan Hasil Kebijakan, Evaluasi Kebijakan. Namun dalam penelitian ini penulis memakai tiga (3) langkah, yaitu:

1. Merumuskan masalah, dalam analisis kebijakan masalah adalah nilai, kebutuhanm atau kesempatan yang belum dapat terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki melalui tindakan publik.
2. Rekomendasi kebijakan yakni menghasilkan informasi tentang kemungkinan aksi/tindakan di masa yang akan datang.
3. Pemantauan hasil kebijakan, pemantauan sering disebut monitoring yang merupakan prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi sebab akibat saat kebijakan dilaksanakan.

Bedasarkan temuan lapangan bahwa ada beberapa permasalahan di wisata setigi yang masih belum dapat diselesaikan, seperti masalah pendanaan, pemanfaatan SDM yang belum maksimal, pengerjaan sarana prasarana wisata yang masih belum 100%. Secara umum permasalahan tersebut antara lain disebabkan karena pendanaan wisata tidak menggunakan dana dari investor luar. Dalam hal ini pendanaan yang masih memanfaatkan dana Pendapatan Asli Desa dan swadaya masyarakat.

Kesimpulan

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, dalam Analisis Kebijakan BUMDes Tentang Pengelolaan Wisata Setigi Untuk Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Sekapuk masih belum optimal dikarenakan masih ada beberapa hal yang belum dapat diselesaikan. Pertama, Dalam pengelolaan wisata setigi belum diterbitkan kebijakan khusus dan hanya mengacu Peraturan Desa Sekapuk Nomor 06 Tahun 2018 Tentang “Rencana Pembangunan Kepariwisata Desa Sekapuk”. Kedua, pembangunan sarana prasarana wisata yang belum 100%. Permasalahan ini akan membuat pengelolaan wisata tersebut tidak maksimal.

Kemudian pada tahapan rekomendasi kebijakan, dari berbagai kebijakan yang ditawarkan diharapkan mampu menjadi solusi untuk menangani masalah dalam pengelolaan Wisata Setigi. Akan tetapi, rekomendasi tersebut belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya persetujuan oleh seluruh stakeholder. Hal tersebut menyebabkan berbagai rekomendasi kebijakan belum dapat dilaksanakan. Pada pemantauan hasil kebijakan, pada tahapan pemantauan kebijakan atau monitoring ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Sekapuk dan BUMDes Sekapuk melainkan dalam pemantauan kebijakan ini masyarakat juga diikutsertakan dalam menilai dan mengawasi selama pembangunan Wisata Setigi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dalam Kebijakan BUMDes Tentang Pengelolaan Wisata Setigi Untuk Perkembangan Ekonomi Masyarakat, adapun saran tersebut sebagai berikut:

- a. BUMDes Sebagai pihak pengelola utama dalam wisata setigi perlu meningkatkan kordinasi dengan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Wisata Setigi.
- b. Perlu adanya penanganan serius dari seluruh stakeholder dalam menangani berbagai masalah yang saat ini terjadi, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang, dengan cara diterbitkannya SOP pengelolaan Wisata Setigi sehingga tidak hanya terpacu dalam Peraturan Desa Sekapuk Nomor 06 Tahun 2018 Tentang “Rencana Pembangunan Kepariwisata Desa Sekapuk”.
- c. Untuk mengatasi masalah pendanaan, BUMDes Sekapuk selaku pihak pengelola perlu menjaring investor luar, dan tidak sepenuhnya

menggunakan Pendapatan Asli Desa(PAD) agar pembangunan wisata dapat terlaksana secara maksimal.

- d. Perlu adanya pengembangan potensi SDM, sehingga dapat menciptakan produk-produk unggulan desa yang dapat dipromosikan di dalam Wisata.
- e. POKDARWIS PELANGI perlu mengembangkan diri, sehingga seluruh anggota dapat menguasai materi mengenai Wisata Setigi dan juga dapat memberikan inovasi-inovasi di dalam Wisata Setigi

Daftar Pustaka

- Rahmadanik, Dida. (tahun). *Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan*. Surabaya: FISIP UNTAG
- Jannah, U. (2019). *Strategi bauran komunikasi pemasaran obyek wisata baru (studi deskriptif wisata bukit kapur setigi di desa sekapuk kecamatan ujungpangkah kabupaten gresik)*.
- Mandira, R. G., & Atmadja, A. T. (2014). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandala Giri Amertha di Desa Tajun. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1 of 10.
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program bumdes. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 140–145.
- Syafrini, D., & Fernandes, R. (2018). Dampak Pergeseran Kebijakan Kota Tambang Menjadi Kota Wisata Tambang Berbudaya Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kota Sawahlunto. *Socius*, 4(2), 74.
<https://doi.org/10.24036/scs.v4i2.23>
- Yachya, A. N. (n.d.). *PENGELOLAAN KAWASAN WISATA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS CBT (COMMUNITY BASED TOURISM) (Studi pada Kawasan Wisata Pantai Clungup Kabupaten Malang)*. 39(2), 107–116.